

Wakil Bupati Hadiri Rapat Koordinasi Percepatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri di Palangka Raya



<https://kip.kapuaskab.go.id>

KUALA KAPUAS - Wakil Bupati Kapuas Drs. H. M. Nafiah Iknor, MM menghadiri Rapat Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mana di pimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan didampingi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (27/5/2021) siang. Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap berupaya untuk selalu mendorong Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan fokus mengatasi Pandemi Covid-19, dan mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik di daerah.

“Sebelumnya pernah disampaikan oleh Bapak Presiden di tahun 2021 fokus mengatasi pandemi Covid-19, serta mendorong Pemda mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan APBD, pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik di daerah,” terangnya.

Kemudian, dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menyampaikan laporan gambaran APBD Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2021, dimana untuk Pendapatan mencapai Rp.4,7 Trilyun dan Belanja Daerah mencapai Rp.4,8 Trilyun. Adapun realisasi APBD Per 25 Mei 2021 mencapai 26,52 persen dari total Rp.4,8 Trilyun yakni Rp. 1,2 Trilyun. Realisasi pendapatan mencapai 25,51 persen yakni sebesar Rp.1,2 Trilyun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp.1,2 Trilyun atau 26,52 persen. Dengan dukungan pendapatan transfer Rp.1,1 Trilyun dari target Rp.2,2 Trilyun atau 51,96 persen.

Lebih lanjut, ia menyampaikan serapan realisasi keuangan Kabupaten/Kota se-Kalteng berkisar pada angka terendah 11,17 persen yakni pada Kabupaten Murung Raya dan tertinggi pada Kabupaten Kapuas dengan serapan 38,02 persen dengan total secara keseluruhan untuk seluruh kabupaten/kota hampir mendekati Rp.3 Trilyun atau 17,35 persen.

“Terkait Refocusing penyediaan anggaran penanggulangan Covid-19, masih terdapat 3 Kabupaten yang belum melakukan Refocusing untuk mencapai target 8 persen yakni Kabupaten Kotawaringin Timur (minus Rp.60 Milyard lebih), Kabupaten Barito Selatan (minus Rp.35 Milyard lebih) dan Kabupaten Murung Raya (minus Rp.24 Milyard lebih),” kata H. Edy Pratowo yang dikutip melalui Situs Resmi Pemprov Kalteng MMC, Kamis (27/5/2021).

Ia pun berharap dengan momentum ini menjadi perhatian khusus bagi para Bupati yang belum melakukan Refocusing anggaran sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.

Sumber berita:

1. <https://kip.kapuaskab.go.id>, Wabup Hadiri Rakor Percepatan APBD Bersama Mendagri RI di Palangka Raya, Kamis, 27 Mei 2021;
2. Harian Kalteng Pos, Wabup Hadiri Rakor Percepatan APBD Bersama Mendagri RI di Palangka Raya, JUMat, 28 Mei 2021.

Catatan:

Pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah difokuskan pada dua hal, yaitu:

1. **Pertama**, untuk penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah diminta melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD pada awal tahun anggaran, agar terhindar dari penumpukan penyerapan anggaran diakhir tahun. Pelaksanaan kegiatan dimaksud juga memperhatikan realisasi penerimaan daerah dan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah antara lain pembentukan tenaga tracing di daerah masing-masing yang selanjutnya diberikan kompensasi melalui APBD.
2. **Kedua**, dalam percepatan kemudahan investasi di daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk mendorong peningkatan investasi ke daerah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan potensi di daerah sehingga sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBD dan APBN guna memperkuat iklim investasi daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah antara lain melalui pemberian insentif (fiskal dan nonfiskal) dan/atau kemudahan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.